

EDISI II | JANUARI-MARET

2026

JEJAK LESTARI

RBP REDD+ GCF OUTPUT II SULAWESI BARAT



**MENJAGA ATAP HIJAU
SULAWESI BARAT: SINERGI
RHL DAN AGENDA IKLIM GLOBAL**

*Dari hutan yang lestari,
lahir usaha yang berarti*



Kementerian
Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia



bpdlh
Indonesian Biodiversity
Conservation Foundation



Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buletin ini, yang kami hadirkan untuk masyarakat Sulawesi Barat serta pemerintah daerah yang peduli pada isu iklim dan kelestarian hutan.

Buletin ini memuat penjelasan singkat tentang REDD+ sebuah inisiatif global untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutanserta bagaimana program ini dijalankan di Sulawesi Barat. Selain itu, kami juga menyajikan galeri visual kegiatan di lapangan dan cerita-cerita dari masyarakat yang terlibat, agar pembaca bisa merasakan langsung semangat, tantangan, dan harapan dalam menjaga hutan kita bersama.

Kami berharap buletin ini dapat menjadi jembatan pengetahuan sekaligus ruang inspirasi. Melalui informasi yang tersaji, semoga tumbuh kesadaran dan dukungan bersama untuk terus melindungi hutan, memperkuat aksi iklim, serta mewariskan lingkungan yang lestari bagi generasi mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buletin ini. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat dan menguatkan kolaborasi kita menuju Sulawesi Barat yang hijau dan berkelanjutan. Selamat membaca!

Tim Redaksi

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	02
Pembuka	04
Apa Itu RHL dan Mengapa Daerah Menjadi Kunci?	05
Sorotan Kegiatan	06
Cerita Lapang	08
Intipati	11
Galeri Visual	12
Lokasi Program	13
Informasi & Agenda Mendatang	14
Mekanisme Penanganan Keluhan	15
Penutup	16
Kredit Redaksi	17

PEMBUKA

Menjaga Atap Hijau Sulawesi Barat: Sinergi RHL dan Agenda Iklim Global

Indonesia merupakan salah satu "paru-paru" dunia dengan tutupan hutan tropis yang menjadi kunci dalam mitigasi perubahan iklim global. Sebagai bagian dari komitmen ini, pemerintah telah menerapkan mekanisme Forest Reference Emission Level (FREL)—sebuah standar pengukuran kinerja untuk melihat sejauh mana kita berhasil menekan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan melalui program REDD+.



Namun, upaya besar ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Melalui pendekatan nested approach, daerah diberikan ruang untuk menyusun FREL subnasional mereka sendiri. Di sinilah posisi strategis Provinsi Sulawesi Barat diuji.

Bentang Alam Sulawesi Barat dalam Angka

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan tahun 2025, Sulawesi Barat adalah provinsi yang kaya akan aset hijau. Sebanyak 64,07% dari luas wilayah kita, atau sekitar 1.059.132 hektar, merupakan kawasan hutan yang meliputi fungsi produksi, lindung, hingga konservasi. Secara visual, hampir setengah dari wilayah Bumi Manakarra (49,38%) masih berselimut tutupan hutan yang rimbun.

Tantangan di Balik Keindahan

Di balik angka-angka yang menjanjikan tersebut, ancaman nyata terus mengintai. Tekanan akibat kebutuhan lahan untuk budidaya dalam beberapa dekade terakhir telah memicu aktivitas deforestasi dan degradasi. Konversi lahan hutan menjadi area penggunaan lain bukan sekadar kehilangan pohon, melainkan juga pelepasan emisi karbon yang signifikan ke atmosfer.

Kondisi inilah yang menempatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagai instrumen vital. Bukan hanya soal menanam kembali, RHL di Sulawesi Barat adalah langkah konkret untuk memulihkan ekologi, memperbaiki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kritis, dan memastikan keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya.



Apa Itu RHL dan Mengapa Daerah Menjadi Kunci?

Banyak yang mengira Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) hanyalah kegiatan menanam pohon secara massal. Padahal, secara substansi, RHL adalah upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan serta lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Dalam konteks Sulawesi Barat, RHL adalah jembatan untuk memperbaiki DAS kritis dan memulihkan ekosistem yang sempat terdegradasi. Namun, pertanyaannya: Mengapa peran Pemerintah Daerah begitu krusial?



Aktor Utama di Garis Depan

Meskipun kebijakan besar sering kali datang dari pusat, Pemerintah Daerah memiliki tiga keunggulan strategis yang tidak dimiliki pihak lain:

1. Kedekatan dengan Tapak dan Masyarakat: Pemda, melalui instansi terkait dan penyuluh, mengenal karakteristik lahan dan sosial budaya masyarakat lokal. RHL hanya akan berhasil jika jenis pohon yang ditanam sesuai dengan kebutuhan warga dan kondisi tanah setempat.⁹
2. Kendali Tata Ruang & Perencanaan: Melalui dokumen seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RPJMD, Pemda memiliki wewenang untuk memastikan bahwa area yang sudah direhabilitasi tidak berubah fungsi di kemudian hari.
3. Dirigen Koordinasi Lintas Sektor: RHL bukan hanya urusan orang kehutanan. Pemda mampu menyatukan dinas pertanian, lingkungan hidup, hingga pemerintah desa untuk bergerak bersama.



SOROTAN KEGIATAN

Penyusunan Aksi Daerah (RAD) REDD+ “FGD Penyusunan Dokumen dan Analisis Data”

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) REDD+ Provinsi Sulawesi Barat terus diperkuat melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pada 27 Januari 2026. Bagi daerah, RAD REDD+ memiliki posisi penting sebagai instrumen untuk menerjemahkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca ke dalam arah kebijakan dan rencana aksi yang lebih konkret. Dokumen ini diharapkan dapat memperkuat sekaligus menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam aspek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta menjadi

pedoman bagi pelaksanaan aksi dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Dengan demikian, RAD REDD+ tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar untuk memproyeksikan kebutuhan kegiatan, pembiayaan, serta pembagian peran dalam mendukung pembangunan rendah emisi di Sulawesi Barat. Dalam arahnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menekankan pentingnya kolaborasi multipihak untuk merumuskan strategi penurunan emisi yang selaras dengan kondisi daerah dan kebijakan nasional.



FGD menghadirkan pemaparan rencana strategis daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca serta progres pengumpulan dan validasi data penyusunan dokumen RAD. Diskusi menggarisbawahi bahwa RAD REDD+ merupakan bagian dari arsitektur besar REDD+ yang terintegrasi dengan dokumen penting seperti FREL, sistem MRV, dan safeguard. Selain aspek teknis, peserta juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas perangkat daerah, serta integrasi lintas sektor dalam mendukung implementasi pembangunan rendah emisi.

Meskipun draft dokumen RAD REDD+ telah memasuki tahap awal, ketersediaan data masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, disepakati langkah tindak lanjut berupa pembagian tugas pengumpulan data serta percepatan penyusunan dokumen. Melalui kegiatan ini, proses penyusunan RAD REDD+ telah menghasilkan gambaran mengenai rencana strategis daerah dalam upaya penurunan emisi, draft awal dokumen, serta identifikasi kebutuhan data yang masih perlu dilengkapi. Kesepakatan untuk berbagi tugas dalam pengumpulan data, menetapkan waktu penyelesaian, dan melanjutkan tahapan penyusunan menjadi langkah konkret untuk mempercepat proses tersebut. Lebih dari itu, FGD memperkuat ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, Pokja REDD+, lembaga mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini menjadi penting agar RAD REDD+ tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat Sulawesi Barat.

SOROTAN KEGIATAN

Workshop Penyusunan Kurikulum Pengembangan Usaha Komunitas

Workshop Penyusunan Kurikulum Pengembangan Usaha Komunitas yang dilaksanakan pada 5 Februari 2026 di Polewali Mandar menjadi langkah awal dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Kegiatan ini dirancang untuk merumuskan kerangka pembelajaran yang lebih terstruktur dan kontekstual, sekaligus menjawab tantangan pengembangan usaha komunitas, mulai dari aspek produksi, pengolahan, hingga akses pasar dan permodalan. Melalui forum ini, para peserta didorong untuk membangun pemahaman bersama bahwa pengembangan usaha komunitas perlu diarahkan pada kemandirian dan keberlanjutan, bukan semata-mata bergantung pada bantuan.

Diskusi berlangsung dinamis melalui berbagai sesi, mulai dari penguatan konsep kewirausahaan hingga pemetaan rantai pasok komoditas kakao di wilayah Majene dan Polewali Mandar. Salah satu poin penting yang mengemuka adalah masih rendahnya tingkat keberhasilan usaha di tingkat desa, yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses pasar, permodalan, serta rendahnya inovasi. Dalam konteks ini, fasilitator didorong untuk tidak hanya mendampingi kelompok, tetapi terlebih dahulu melakukan identifikasi calon pelaku usaha yang memiliki motivasi, kapasitas, dan kesiapan berusaha. Identifikasi tersebut dapat melihat

sejumlah aspek, seperti motivasi dan inisiatif berusaha, kemampuan mengelola usaha, kreativitas dan inovasi, kesiapan untuk bekerja sama, serta rekam jejak keterlibatan dalam kegiatan desa.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan ini menghasilkan arah model pendampingan usaha komunitas yang dimulai dari proses identifikasi pengusaha potensial di tingkat desa, kemudian dilanjutkan dengan fasilitasi penyatuan calon pelaku usaha dalam kelompok dan pengembangan usaha. Pendekatan tersebut diperkuat melalui konsep Resources, Organization, and Norms (RON), yang menempatkan sumber daya, organisasi, dan norma sebagai unsur yang perlu dibangun secara sinergis dalam



pengembangan kelompok usaha. Pendampingan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan sumber daya dan penguatan struktur kelompok, tetapi juga pada proses membangun kesepakatan bersama di antara anggota yang memiliki latar belakang, kepentingan, dan tingkat keberanian mengambil risiko yang berbeda. Dengan pendekatan ini, diharapkan proses pendampingan KUPS dapat berjalan lebih terarah, bertahap, dan mampu mendorong tumbuhnya usaha komunitas yang berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

CERITA DARI LAPANGAN

Jejak Hari Pertama: Suara Dari Mangga Dua

Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari buku dan ruang kelas. Tapi pelajaran tentang masyarakat, alam, dan ketahanan hidup seringkali hanya bisa ditemukan saat kaki benar-benar menjejak tanah. Percakapan tidak dibatasi meja dan mendengarkan menjadi cara utama untuk memahami.

Sabtu pagi, 4 Januari 2025, kegiatan asesmen awal bersama KTPH Pokadulu menjadi momen pertama yang benar-benar membuka mata saya. Tim program berkumpul sejak pagi di kantor SCF Kendari. Persiapan dilakukan dengan cukup matang, mulai dari pemetaan lokasi, pembagian tugas, hingga penyamaan persepsi soal pendekatan yang ingin kami gunakan. Saya merasa gugup, tapi antusias. Ini bukan sekadar survei lapangan, tapi upaya untuk benar-benar memahami kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidup pada hutan dan lahan. Tim dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama bertugas melakukan wawancara bersama masyarakat dari KTPH Pokadulu 1 di wilayah bawah. Sedangkan wilayah KTPH Pokadulu 2 melakukan observasi langsung dan wawancara ke kawasan Tahura Nipa-Nipa.

Rumah pertama yang dikunjungi milik La Ode Fia (disapa Pak Fia), ketua KTPH Pokadulu 1. Saat tiba, Pak Fia menyambut dengan senyum yang tenang dan gestur yang ramah. Kami mengobrol banyak mengenai lahan yang dikelolanya yang memiliki sumber air yang terjaga hingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal tersebut membuat Pak Fia dipercaya mengelola sistem air bersih di kawasan tersebut. Dari Pak Fia, kami belajar bagaimana sistem pengelolaan air dilakukan secara gotong royong dan dijaga dengan penuh kesadaran. Air bersih yang mengalir dari sumber di hutan telah menjadi tumpuan utama bagi kegiatan pertanian dan rumah tangga masyarakat setempat.



Beliau juga menyampaikan bahwa madu hutan di Kawasan KTPH Pokadulu 1 belum dikelola. Padahal, potensi lebah madu cukup besar di kawasan tersebut. Keterbatasan pelatihan menjadi salah satu penyebab utamanya. Pengetahuan teknis tentang cara mengambil dan mengolah madu secara berkelanjutan belum banyak dimiliki. Bagi saya, hal ini menjadi cerminan bahwa banyak potensi sudah ada di sekitar warga namun, belum semua memiliki jalan untuk mengembangkannya.

Hal berbeda kami peroleh dalam kunjungan kedua menuju kawasan Tahura Nipa-Nipa, tepatnya rumah La Ode Manuwi (disapa Pak Manuwi), Ketua KTPH Pokadulu 2. Jalan berbatu dan menanjak menjadi tantangan tersendiri. Sepanjang perjalanan, saya sempat berpikir kalau hanya ke sini saja sudah sulit, bagaimana masyarakat membawa hasil panennya keluar dari sini? Tapi semua terbayar saat kami bertemu langsung dengan Pak Manuwi. Beliau bercerita tentang bagaimana komunitasnya mengelola lahan dengan prinsip kearifan lokal, mengatur air dengan bijak, dan berusaha bertahan di tengah berbagai keterbatasan.



Pak Manuwi tidak mengeluh. Meskipun mengalami berbagai keterbatasan, seperti minimnya fasilitas penyimpanan dan akses pasar yang jauh, Pak Manuwi tetap optimis.

Beliau sedang mengembangkan usaha ternak ayam dan memiliki ketertarikan kuat memulai mengelola madu lebah hutan. Selain itu, Pak Manuwi juga menanam nilam, dan menunjukkan kepada kami banyaknya pohon aren yang tumbuh di sekitar area kelola miliknya. Pak Manuwi menyampaikan bahwa lahan di kelompoknya cukup subur, namun belum tergarap maksimal karena keterbatasan pelatihan teknis untuk mengolah hasil hutan seperti nira, nilam, maupun madu menjadi produk yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Harapannya sederhana: masyarakat ingin belajar, dan siap beradaptasi.

Hal berbeda kami peroleh dalam kunjungan kedua menuju kawasan Tahura Nipa-Nipa, tepatnya rumah La Ode Manuwi (disapa Pak Manuwi), Ketua KTPH Pokadulu 2. Jalan berbatu dan menanjak menjadi tantangan tersendiri. Sepanjang perjalanan, saya sempat berpikir kalau hanya ke sini saja sudah sulit, bagaimana masyarakat membawa hasil panennya keluar dari sini? Tapi semua terbayar saat kami bertemu langsung dengan Pak Manuwi. Beliau bercerita tentang bagaimana komunitasnya mengelola lahan dengan prinsip kearifan lokal, mengatur air dengan bijak, dan berusaha bertahan di tengah berbagai keterbatasan. Pak Manuwi tidak mengeluh. Meskipun mengalami berbagai keterbatasan, seperti minimnya fasilitas penyimpanan dan akses pasar yang jauh, Pak Manuwi tetap optimis.

Beliau sedang mengembangkan usaha ternak ayam dan memiliki ketertarikan kuat memulai mengelola madu lebah hutan. Selain itu, Pak Manuwi juga menanam nilam, dan menunjukkan kepada kami banyaknya pohon aren yang tumbuh di sekitar area kelola miliknya. Pak Manuwi menyampaikan bahwa lahan di kelompoknya cukup subur, namun belum tergarap maksimal karena keterbatasan pelatihan teknis untuk mengolah hasil hutan seperti nira, nilam, maupun madu menjadi produk yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Harapannya sederhana: masyarakat ingin belajar, dan siap beradaptasi.



GALERI VISUAL



27 JANUARI 2026

FGD Penyusunan Dokumen dan Analisis Data



11 – 12 FEBRUARI 2026

Rapat Asistensi ke Kemenhut terkait FOLU Net Sink Sulawesi Barat



2-31 JANUARI 2026

Penyusunan Kurikulum Kelembagaan Usaha Komunitas



20-21 MARET 2025

Patroli Kawasan Hutan Secara Partisipatif KPH Malunda



5-6 MARET 2025

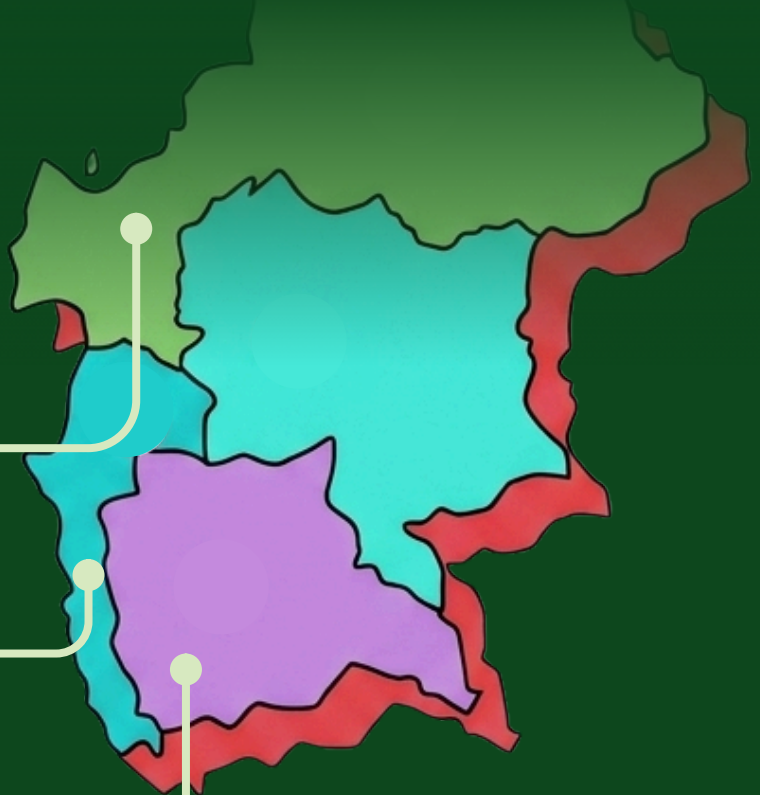
**Fasilitasi Kelembagaan Usaha
(Identifikasi Potensi dan Profil Usaha Perhutanan Sosial)**

Lokasi Program

2 Desa di
Kabupaten Mamuju

3 Desa di
Kabupaten Majene

4 Desa di
Kabupaten Polman



Kabupaten Mamuju

- Desa Guliling
- Desa Orobatu

Kabupaten Majene

- Desa Mekatta
- Desa Onang
- Desa Awo

Kabupaten Polewali Mandar

- Desa Kalumamang
- Desa Puppuring
- Desa Paopao
- Desa Alu

Program ini Telah Berjalan di 3
Kabupaten di Sulawesi Barat, yaitu
Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene,
dan Kabupaten Polewali Mandar.

INFORMASI DAN KEGIATAN MENDATANG



Kanal Media Sosial

Informasi program dapat diakses melalui tautan ini



Sulawesi Cipta Forum

Jl. Taman Goyen Raya I, Kassi-Kassi, Rappocini, Kota Makassar, Indonesia, Sulawesi Selatan
info@scf.or.id

Mekanisme Penanganan Keluhan



1

Pengajuan Keluhan

Keluhan diterima melalui kontak keluhan 0853-9777-3020, atau melalui email info@scf.or.id yang dibuka setiap minggu

2

Verifikasi dan Penerimaan

Tiap keluhan yang masuk dicatat dan dikategorikan jenisnya

3

Penyelidikan dan Analisis

Sehari setelah proses pencatatan selesai, keluhan akan dibahas dalam rapat bagian sekretaris, SDM, Logistic dan MEAL. Tim pencari fakta akan melakukan investigasi atas keluhan yang masuk. Proses investigasi dilakukan paling lama 3 hari.

4

Penyusunan Rencana Penyelesaian

Hasil investigasi tim pencari fakta akan kembali dibahas dalam rapat pembahasan bersama Departemen Pengembangan Komunitas, Kemitraan, dan Inovasi serta Ketua bidang terkait pemecahan masalah dan penindakan untuk selanjutnya dilakukan tindakan penyelesaian.

5

Implementasi Penyelesaian

Proses penyelesaian keluhan akan mulai diterapkan setelah akar masalah selesai dirembukkan dan rencana tindakan rampung.

6

Pemantauan dan Evaluasi

Implementasi penyelesaian akan terus dalam pemantauan. Dalam hal penanganan keluhan tidak dapat diselesaikan, akan diajukan ke rapat Dewan Board sebagai ruang pengambilan keputusan tertinggi.

7

Penutupan Kasus

Kasus ditutup setelah keluhan ditangani.

8

Proses Banding (Opsional)

scan untuk
pengaduan



Penutup

Buletin ini kami hadirkan sebagai media berbagi pembelajaran dan capaian dalam implementasi Program RBP REDD+ GCF di Sulawesi Barat. Keberhasilan pelaksanaan program tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi semua pihak yang telah bekerja sama menjaga kelestarian hutan.

Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada seluruh mitra dan komunitas yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Sulawesi Barat: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulbar, KPH, Dinas Kehutanan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, KTH/KUPS, akademisi, dan seluruh warga desa yang terus menyalakan harapan.

Terima kasih khusus kepada Tim Program Provinsi Sulawesi Barat

- Penanggung Jawab Program: Dr. Arham, S. P., M. Sc..
- Program Manager: Abdul Syukur Ahmad
- Tim Keuangan dan Admin: Hasnawati Masidung, Riska Amaliah & Sitti Nurhalisa
- Tim Perencanaan, Pengelolaan GRK, Gender dan Monitoring: Muliadi Makmur, Maskur & Namira Arsa
- Program Officer: Ahmad Paska Linus & Zulkifli Basri
- PPK: Hapriandi Idris
- Field Officer: M. Sukri, Junaib, Ahmad Rifai, Hilda Ningsih, Akbar Gazali, Muhammad Awal Fikri, Mulyadi, S.Sos, Irham Idris, Nur Rachmad Hamid, dan Salman Wahab.

Semoga Rehabilitasi Hutan dan Lahan menjadi ikhtiar bersama untuk memulihkan alam dan mewariskan Sulawesi Barat yang hijau, lestari, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Tim Redaksi



KREDIT REDAKSI

Tim Redaksi

Muliadi Makmur

Arif Maulana Talitti Mattata

Rafiqah Ulfah Masbah

Muh. Awal Fikri

Tim penulis

Muh. Awal Fikri

Editor

Arif Maulana Talitti Mattata

Desain dan Tata Letak:

Rafiqah Ulfah Masbah

Fotografer

Fasilitator Lapangan tim GCF REDD+ Sulbar

Muh. Awal Fikri

Web: scf.or.id